

Asas Kabotase dalam Instruksi Presiden 5/2005: Sudahkah memberdayakan Industri Pelayaran Nasional ?

Koesrianti

Abstract:

Indonesian shipping industry was dominated by foreign carrier vessels. This was happened because of the Indonesian government maritime policies, which were started in 1980s, was not at the side of national shipping industry. In 2005, the government has intended to revitalizing shipping industry by enacted the President Instruction number 5 year 2005 (Inpres 5/2005). This Article discusses the implementation of this Instruction that was launched on 28 March 2005. This Instruction consists of cabotage principle that should be imposed in Indonesia. However, there are many other considerations to be observed to the proper implementation of this principle. This Article analyzes these considerations as well as anticipatory policies should be done.

Key words: kabotase, inpres 5/2005, industri pelayaran, maritim, shipping industry.

I. PENDAHULUAN

Industri pelayaran dan angkutan laut telah diakui sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari infrastruktur ekonomi dan keamanan nasional Indonesia yang merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia. Industri ini merupakan sektor yang sangat potensial yang perlu dikelola dengan baik. Indonesia mempunyai posisi geostrategis yang penting dalam industri pelayaran regional maupun internasional. Sebagai konsekuensinya, maka pemerintah harus mengatur secara ketat ketentuan dibidang ini untuk mendorong terbentuknya industri pelayaran yang kokoh. Industri ini merupakan '*public utility*' yang memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.

Pengiriman barang baik antar pulau atau antar negara dapat dilakukan dengan dua cara, melalui udara dan laut. Untuk pengiriman barang yang sifatnya regular berjadwal tetap dan komersial biasanya pihak pemilik barang akan mengirim barangnya melalui laut. Hal ini ditempuh untuk menekan biaya pengiriman barang karena pada umumnya pengiriman barang lewat laut lebih murah dari pada lewat udara. Demikian juga pengiriman barang antar pulau di suatu negara, maka pemilik barang akan lebih memilih angkutan laut dari pada angkutan udara dengan alasan yang sama.

Menurut penelitian dari IMO (*International Maritime Organization*), sebuah organisasi